



Dorong UMKM Tak Terjebak Orientasi Kapitalis Atas

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas. Tak sekadar bertambah secara kuantitas, UMKM di Kota Gudeg dituntut memiliki ideologi kuat dalam menguasai pasar dan rantai produksi agar lebih berdaya saing.

Hal itu ditekankan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo saat membuka Workshop Nasional Business Blueprint UMKM yang digelar Gerakan Entrepreneur Masyarakat Maju (GEMMA) Indonesia Raya di Hotel Arkadewi Boutique, kemarin (23/4). Hasto menilai, kelemahan mendasar UMKM saat ini adalah ketiadaan sistem yang mapan untuk memproteksi

produk dan pasar lokal.

"Kalau bicara *blueprint*, kita harus bicara kerangka pikir. Ideologi dan prinsipnya adalah bagaimana menguasai pasar dan produksi. Organisasi pengusaha seperti GEMMA dan dinas pembina harus terus menjejali konsep ini kepada pelaku UMKM," tegas Hasto usai pembukaan workshop.

Mantan Kepala BKKBN RI ini menyebut, keterbatasan *level of thinking* seringkali menjadi hambatan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dan organisasi profesi sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir tersebut.

Hasto mencontohkan langkah konkret Pemkot Yogyakarta melalui kebijakan Batik Segoro Amarto Reborn.

■ **Baca DORONG...** Hal II



Dok. DISKOMINFOSANJOGLO JOGJA

KOLABORASI: Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo berfoto bersama usai pembukaan Workshop Nasional Business Blueprint UMKM di Hotel Arkadewi Boutique, kemarin (23/4).

Dorong UMKM Tak Terjebak Orientasi Kapitalis Atas

sambungan dari hal Joglo Jogja

Seragam wajib bagi 6.500 ASN Pemkot Jogja tersebut diproduksi langsung oleh UMKM melalui Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Langkah ini dinilai efektif untuk memastikan UMKM memegang kendali pasar.

“Fokus kita bukan lagi menambah jumlah UMKM, tapi meningkatkan kualitas dan pendapatan mereka agar naik kelas. Saya titip, jangan terjebak orientasi kapitalis kanan atas

yang mengakumulasi uang pada segelintir orang. Baliklah ke kapitalis kanan bawah, di mana modal dikuasai rakyat, koperasi, dan UMKM,” imbuhnya.

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Bebasari Sitarini menambahkan, saat ini terdapat 6.835 UMKM yang telah terverifikasi. Namun, jika merujuk data Sibakul, potensi UMKM di Kota Jogja mencapai

36.000, dengan 24.000 di antaranya sudah ter-update.

“Mayoritas bergerak di sektor kuliner, fesyen, dan kerajinan. Kami terus mendorong *branding* dan pendampingan agar mereka bisa *go global*. Kontinuitas dan kualitas produk adalah harga mati agar bisa bersaing di pasar internasional,” jelas Sita.

Sementara itu, Ketua Umum GEMMA Indonesia Raya, Sri Setiawati menyatakan komitmennya untuk bersinergi

dengan Pemkot Jogja. Lewat workshop bertajuk *Smart Branding and Smart Funding*, pihaknya menasar transformasi UMKM yang inklusif.

“Kami merangkul pelaku usaha dari kalangan perempuan, lansia, hingga disabilitas. Harapannya, kolaborasi dengan berbagai kementerian bisa disinergikan di Jogja untuk memajukan ekonomi kerakyatan,” tandasnya. **(eri/bid/ul)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005